

TREN ANGKA PUTUS SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SELAMA 10 TAHUN KE DEPAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TREND OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL DROPOUT RATES FOR 10 YEARS IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Malisa Bunga Hati
Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY
malisa7873fip2016@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui tren angka putus sekolah jenjang SMK selama 10 tahun ke depan di DIY; 2. Mengetahui kebijakan dan program yang diupayakan pemerintah untuk mengurangi angka putus sekolah di DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder dan wawancara. Data sekunder berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Analisis data menggunakan Analisis Tren dengan persamaan $\dot{Y} = a + bx$. Hasil penelitian adalah: 1. Tren APtS jenjang SMK selama 10 tahun ke depan di DIY pada anak laki-laki mengalami kecenderungan menurun dengan persentase mencapai 0,92% dan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, sedangkan pada anak perempuan mengalami kecenderungan meningkat dengan persentase mencapai 2,12% dan belum mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; dan 2. Kebijakan dan program untuk mengurangi APtS jenjang SMK di DIY yaitu kebijakan pembiayaan pendidikan melalui program BOS dan kebijakan serta program dengan inovasi di masing-masing daerah.

Kata Kunci: Tren, Angka Putus Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan, DIY.

Abstract

This study aims to: 1. Determine the trend of vocational school dropout rates for the next 10 years in DIY; 2. Knowing the policies and programs being pursued by the government to reduce the number of dropouts in DIY. This research uses a descriptive quantitative approach with secondary data analysis and interview methods. Secondary data came from the Department of Youth Education and Sports DIY. Data analysis uses Trend Analysis with the equation $\dot{Y} = a + bx$. The results of the study are: 1. The trend of APtS Vocational School for the next 10 years in DIY in boys has a downward trend with a percentage reaching 0,92% and has met the Minimum Service Standards in Education, while girls have a tendency to increase with a percentage reached 2,12% and have not been able to meet the Minimum Service Standards in Education; and 2. Policies and programs to reduce the APtS of SMK levels in DIY, namely the education financing policy through the BOS program and policies and programs with innovation in the region.

Keywords: Trends, Dropout Rates, Vocational High Schools, DIY.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk

memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa membedakan suku, ras, agama, bahkan keadaan sosial maupun keadaan ekonominya. Hak mendapatkan pendidikan juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Meningkatkan kualitas hidupnya berarti meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi warga negara yang cerdas.

Nawacita Presiden Joko Widodo Nomor 5 menyebutkan bahwa akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Program Indonesia Pintar. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 (a) disebutkan bahwa Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, Program Indonesia Pintar atau yang disingkat PIP bertujuan untuk mencegah anak dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena kesulitan ekonomi.

Penuntasan pendidikan sampai pendidikan menengah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Muamalah (2017) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing juga tidak lepas dari pendidikan. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi pendidikan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas sumber daya manusia di negara tersebut.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pendidikan masih belum merata sampai ke seluruh wilayah di Indonesia. DIY dengan predikat Kota Pelajar memiliki anak putus sekolah sebanyak 1997 anak dan jumlah penduduk usia <16, 16-18, dan >18 sebanyak 89.243 dengan persentase 2,23%. DIY berada pada peringkat 17 dari 34 provinsi dengan anak putus sekolah terbanyak di Indonesia. (Sumber: PDSPK Kemendikbud 2018)

Angka putus sekolah di DIY pada tahun 2018 jenjang SMA sebanyak 0,53% dan SMK sebanyak 1,91%. Anak putus sekolah jenjang SMK sebanyak 1.703 anak hampir 6 kali lipat dari jumlah anak putus sekolah pada jenjang SMA yaitu sebanyak 294 anak. DIY juga menyumbang angka putus sekolah di Indonesia pada jenjang SMA sebanyak 0,56% dan jenjang SMK sebanyak 1,60%. Pada jenjang SMK menyumbang angka putus sekolah hampir 3 kali lipat dari angka putus sekolah jenjang SMA. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka putus sekolah yang terjadi di DIY pada jenjang SMK lebih banyak daripada jenjang SMA.

Berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa anak putus sekolah jenjang SMK pada anak laki-laki sebanyak 1.257 anak hampir 3 kali lipat dari jumlah anak putus sekolah pada anak perempuan yaitu sebanyak 446 anak. Persentase anak putus sekolah jenjang SMK pada anak laki-laki mencapai 2,49% dan pada anak perempuan

mencapai 1,16%. Selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Pasal 4 Ayat 2 (a) disebutkan bahwa untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, anak putus sekolah tidak melebihi 1% dari jumlah anak yang bersekolah. Namun, fakta menunjukkan bahwa anak putus sekolah jenjang SMK di DIY lebih dari 1% baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Berdasarkan data di atas, tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMK memerlukan upaya yang serius untuk menguranginya. Upaya untuk mengurangi angka putus sekolah adalah dengan membuat kebijakan. Salah satu tahapan dalam kebijakan adalah peramalan (*forecasting*). Dunn (2003: 291) menjelaskan bahwa peramalan merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan dapat menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan di masa depan dan konsekuensinya jika kebijakan tersebut diterapkan atau tidak diterapkan. Selain itu, peramalan memungkinkan kontrol yang lebih besar karena telah memahami kebijakan masa lalu dengan konsekuensinya sehingga dapat meminimalisir risiko.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder. Metode analisis data sekunder dijelaskan melalui statistik deskriptif karena dilakukan pada populasi (tanpa mengambil sampel) dan statistik inferensial karena peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY dan Balai Pendidikan Menengah di seluruh Kabupaten/Kota di DIY. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu pada bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah data angka putus sekolah di DIY selama lima tahun terakhir (tahun 2014-2018) dan di generalisasi dalam lima kabupaten/kota di DIY.

Definisi Operasional Variabel

Angka Putus Sekolah (APtS) merupakan persentase anak yang tidak bersekolah lagi atau tidak dapat menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu berdasarkan usia sekolah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari sumber sekunder tentang angka putus sekolah jenjang SMK di DIY pada tahun 2014-2018.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini sebagai pelengkap terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh melalui teknik sebelumnya. Wawancara pada penelitian ini termasuk wawancara informal dan pedoman wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY dan Kepala Balai Pendidikan Menengah di seluruh Kabupaten dan Kota di DIY.

Instrumen

Pedoman dokumentasi dan pedoman wawancara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman Dokumentasi

No.	Aspek yang Dicari	Sumber Data
1.	Jumlah Anak Putus Sekolah jenjang SMK dari tahun 2014-2018.	Dokumen atau arsip
2.	Jumlah anak usia <16, 16-18, >18 tahun dari tahun 2014-2018.	Dokumen atau arsip

Pedoman Wawancara:

1. Apa saja kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah untuk mengurangi angka putus sekolah jenjang SMK di kabupaten/kota di DIY?
2. Bagaimana sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut?
3. Adakah kendala dalam proses implementasi kebijakan tersebut? Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menghadapi kendala tersebut?
4. Bagaimana proses monitoring dari pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan tersebut?
5. Bagaimana hasil dari implementasi kebijakan tersebut? Sudahkah sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dibuat?

Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY Bidang Perencanaan dan Standarisasi. Data sekunder tersebut diperoleh lembaga melalui penyebaran instrumen di setiap sekolah baik negeri maupun swasta. Instrumen dan data sekunder tersebut telah valid dan reliabel karena diperoleh dari lembaga yang kredibel (dapat dipercaya).

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Tren dengan metode jumlah kuadrat terkecil (*least square*

method) dan menggunakan persamaan $\dot{Y} = a + bx$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa tren APtS pada anak laki-laki jenjang SMK di Kabupaten/Kota di DIY, sebagai berikut:

Tabel 2. Tren APtS Pada Anak Laki-Laki Jenjang SMK Kabupaten/Kota di DIY

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Bantul	Sleman	Gunung kidul	Kulon Progo	Yogyakarta
2019	0.75	1.13	1.49	2.40	0.21
2020	0.80	1.39	1.53	2.93	-0.53
2021	0.84	1.63	1.65	3.45	-1.38
2022	0.80	1.85	1.76	3.97	-2.22
2023	0.84	2.06	1.80	4.33	-3.05
2024	0.87	2.26	1.90	4.83	-3.77
2025	0.90	2.45	2.00	5.31	-4.59
2026	0.87	2.63	2.03	5.79	-5.40
2027	0.90	2.80	2.13	6.25	-6.11
2028	0.92	2.96	2.22	6.58	-6.91

Sumber: Olah Data (menggunakan *Microsoft Excel Windows 2010*)

Pada tabel di atas diketahui bahwa tren APtS pada anak laki-laki jenjang SMK di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sampai 2028 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 sampai 2018 dengan kestabilan menurun. Pada tabel di atas juga diketahui bahwa Kota Yogyakarta mampu menggungguli kabupaten lain di DIY dengan APtS mencapai 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak anak laki-laki usia SMK di Kota Yogyakarta yang bersekolah.

Selanjutnya, tabel tren APtS pada anak perempuan jenjang SMK di Kabupaten/Kota di DIY, sebagai berikut:

Tabel 3. Tren APtS Pada Anak Perempuan Jenjang SMK Kabupaten/Kota di DIY

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Bantul	Sleman	Gunung kidul	Kulon Progo	Yogyakarta
2019	2.32	0.89	0.69	2.63	0.13
2020	2.75	0.95	0.67	3.29	0.00
2021	3.04	1.08	0.75	3.73	-0.12
2022	3.43	1.13	0.73	4.18	-0.24
2023	3.69	1.17	0.71	4.63	-0.36
2024	4.04	1.29	0.79	5.08	-0.47
2025	4.27	1.32	0.77	5.76	-0.57
2026	4.60	1.43	0.75	6.21	-0.57
2027	4.80	1.46	0.82	6.67	-0.78
2028	5.10	1.49	0.80	7.13	-0.77

Sumber: Olah Data (menggunakan *Microsoft Excel Windows 2010*)

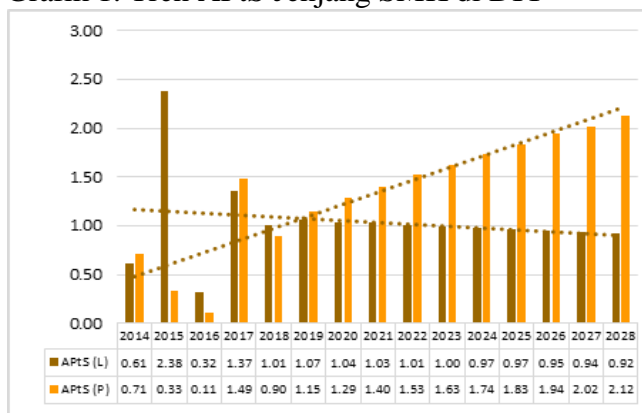
Pada tabel di atas diketahui bahwa tren APtS pada anak perempuan jenjang SMK di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sampai 2028 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 sampai 2018 dengan kestabilan menurun. Pada tabel di atas juga diketahui bahwa Kota Yogyakarta mampu menggungguli kabupaten lain di DIY dengan APtS mencapai 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak anak perempuan usia SMK yang bersekolah.

Dengan adanya tren APtS pada jenjang SMK, maka dapat diketahui banyak sedikitnya jumlah anak yang putus sekolah pada jenjang SMK. Hal ini sejalan dengan pendapat Tilaar & Nugroho (2008: 414) yang menegaskan bahwa perhitungan APtS berguna untuk mengetahui banyaknya anak

yang putus sekolah di suatu daerah. Perhitungan APtS dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui tinggi atau rendahnya anak yang putus sekolah pada jenjang SMK di DIY. Semakin rendah nilainya maka semakin baik atau efisien dengan anggapan standar mutu tidak berubah (Sutiman & Raharja, 2002: 57).

Hasil prediksi tren APtS jenjang SMK di DIY dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Tren APtS Jenjang SMK di DIY



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa:

1. Tren APtS pada anak laki-laki jenjang SMK di DIY mengalami kecenderungan menurun hingga mencapai 0,92%. Tren APtS pada anak laki-laki jenjang SMK di DIY mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan karena APtS tidak melebihi 1%. Selanjutnya, tren APtS pada anak laki-laki jenjang SMK di DIY semakin menurun maka semakin baik dengan anggapan bahwa standar mutu tidak berubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki jenjang SMK di DIY semakin sedikit yang putus sekolah.
2. Tren APtS pada anak perempuan jenjang SMK di DIY mengalami kecenderungan

meningkat hingga mencapai 2,12%. Tren APtS pada anak perempuan jenjang SMK di DIY belum mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan karena melebihi 1%. Selanjutnya, tren APtS pada anak perempuan jenjang SMK di DIY semakin meningkat maka semakin kurang baik dan kurang efisien dengan anggapan bahwa standar mutu tidak berubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya anak perempuan jenjang SMK di DIY yang putus sekolah.

Pemerintah pusat telah melaksanakan kebijakan terkait pengurangan angka putus sekolah dengan dibuatnya kebijakan pembiayaan pendidikan berupa pemberian anggaran pendidikan di setiap daerah. Salah satunya melalui program BOS.

Berdasarkan hasil wawancara di setiap kabupaten/kota di DIY, dijelaskan bahwa penyebab anak putus sekolah jenjang SMK didominasi oleh faktor motivasi baik dari individu, sekolah, keluarga maupun lingkungan. Triyas (2017) dalam CNN Indonesia menjelaskan bahwa anak putus sekolah berpengaruh dengan persoalan kemiskinan. Putus sekolah menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Tan dan Shao (2015) yang menyatakan bahwa memprediksi anak putus

sekolah dapat memberikan solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah putus sekolah. Selain itu, seorang perumus atau analis kebijakan dapat meminimalisir kesalahan dengan melakukan antisipasi sejak dini. Sejalan dengan pendapat Dunn (1994: 291) yang menjelaskan bahwa seorang perumus atau analis kebijakan yang melakukan peramalan akan mendapatkan gambaran dan informasi mengenai peluang kebijakan di masa depan.

Setelah melakukan prediksi yang merupakan salah satu proses pengambilan kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah adopsi atau pengambilan keputusan. Brewer dan deLeon menjelaskan bahwa pada tahap adopsi sebagai tahap seleksi yang menekankan bahwa seseorang yang dalam hal ini adalah pembuat kebijakan harus membuat sebuah keputusan. Selanjutnya, Sutjipto (1987: 32) menjelaskan bahwa keputusan dibuat dan dipertimbangkan konsekuensi di masa mendatang sebagai informasi yang relevan dengan kebijakan dan juga berbagai alternatif yang telah tersedia. Keputusan dalam penelitian ini merupakan sebuah alternatif dari hasil prediksi atau estimasi tren APtS jenjang SMK di DIY.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Taş, dkk (2013) yang memberikan alternatif untuk mengurangi APtS dengan Program Pemantauan Putus Sekolah yang dikembangkan untuk melacak siswa yang putus sekolah. Selain itu, program dapat

berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi yang kuat dengan pihak sekolah dan orang tua atau wali murid untuk mencegah putus sekolah. Program ini juga berjalan di Kota Yogyakarta dengan menjemput kembali anak yang putus sekolah dan mengarahkan anak untuk kembali ke sekolah. Program ini disebut dengan program *retrivel*. Program *retrivel* dapat dikatakan berhasil karena pada tren APtS jenjang SMK di Kota Yogyakarta baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan mengalami penurunan.

Temuan dalam hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian dari Ali Taş, dkk (2013) yang menjelaskan bahwa anak yang putus sekolah karena membantu keluarga untuk bekerja agar menghasilkan uang. Temuan dalam hasil penelitian ini terjadi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul dengan hasil tren APtS meningkat baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan.

Temun lainnya adalah karena belum tepatnya dalam memilih jurusan. Djojonegoro (1998) menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan didasarkan pada kebutuhan dunia kerja. Wawancara yang dilakukan peneliti di Balai Dikmen Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa terdapat jurusan yang unik dan kurang relevan dengan kebutuhan di lapangan pekerjaan saat ini. Garnesia (2018) dalam surat kabar Tirta menjelaskan bahwa SMK dirancang untuk menyiapkan lulusan yang

dapat bekerja sesuai kompetisi yang dimiliki. SMK seharusnya menjadi solusi dari kesenjangan antara dunia sekolah dengan dunia industri karena siswa SMK dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang handal dan siap pakai.

Djojonegoro (1998) menjelaskan bahwa kunci sukses pendidikan kejuruan adalah hubungan yang erat dengan dunia kerja dan pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang memadai untuk praktik. Temuan lain dalam hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa relasi sekolah dengan lembaga, perusahaan maupun tempat praktik mempengaruhi motivasi anak untuk bersekolah. Selain itu, kurangnya minat siswa untuk melaksanakan praktik lapangan di bengkel-bengkel kecil atau bengkel rumahan. Pendidikan kejuruan juga harus reponsif terhadap kemajuan teknologi. Jika perusahaan saat ini menggunakan mesin untuk operasionalnya, maka siswa di SMK dibekali cara untuk mengoperasikan mesin tersebut agar tetap dibutuhkan di lapangan pekerjaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tren APtS selama 10 tahun ke depan jenjang SMK di DIY pada anak laki-laki mengalami kecenderungan menurun dengan persentase mencapai 0,92% dan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, sedangkan

pada anak perempuan mengalami kecenderungan meningkat dengan persentase mencapai 2,12% dan belum mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

2. Kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk mengurangi APtS jenjang SMK yaitu dengan kebijakan pembiayaan pendidikan melalui program BOS dan melaksanakan kebijakan serta program dengan inovasi di masing-masing daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran-saran sebagai upaya memberi masukan bagi pengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di DIY
 - a. Melaksanakan program penjemputan kembali anak putus sekolah atau *retrivel*, karena permasalahan anak putus sekolah jenjang SMK bukan hanya faktor ekonomi melainkan didominasi oleh faktor motivasi.
 - b. Pembentukan satuan tim penjangkaran anak putus sekolah yang dilakukan dengan tim koordinasi pendidikan menengah dan berkoordinasi dengan masyarakat.
 - c. Penambahan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di setiap kecamatan untuk melaksanakan program Paket C.

- d. Penguatan program parenting yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan konten yang terstandar.
2. Bagi Sekolah
 - a. Memperbanyak relasi dan menjalin hubungan yang kuat dengan tempat praktik siswa maupun lapangan pekerjaan.
 - b. Melaksanakan pembelajaran yang responsif dengan kemajuan teknologi dan didasarkan pada kebutuhan dunia kerja.
 - c. Memiliki fasilitas yang lengkap serta memadai untuk menunjang pembelajaran siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W.N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall International.
- Garnesia, I. (2018). Persoalan SMK: Stigma, Putus Sekolah, hingga Pengangguran. Diakses pada tanggal 25 April 2020, dari <https://tirto.id/persoalan-smk-stigma-putus-sekolah-hingga-pengangguran-cPhn>
- Kemendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19, Tahun 2016, tentang Program Indonesia Pintar*.
- Kemendikbud. (2018). *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2018*. Jakarta: PDSPK Kemdikbud. Diakses pada tanggal 07 November 2019, dari <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>.
- Kemenristekdikti. (2014). *Nawacita Presiden Joko Widodo Nomor 5, Tahun 2014, tentang Kenaikan Kualitas Hidup Manusia Indonesia*.
- Muamalah, B. (2017). *Studi Analisis Penanganan Anak Putus Sekolah Di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sutimah & Raharja, S. (2002). *Perencanaan Pendidikan Mikro*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Tan, M. & Shao, P. (2015). Prediction of Student Dropout in E-Learning Program Through the Use of Machine Learning Method. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. Vol. 10, 11-16.
- Taş, A., Selvitopu, A., Bora, V., et al. (2013). Reasons for Dropout for Vocational High School Students. *Educational Sciences: Theory & Practice*. 13 (3), 1561-1564.
- Tilaar, H.A.R. & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Surakarta: Pustaka Mandiri.